
**SBSN SERI *PROJECT BASED SUKUK* (PBS): INSTRUMEN
INVESTASI UNTUK MEMBANGUN NEGERI**

Oleh:

AGUS SALIM

agussalimmawon@gmail.com

Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran pada sektor pembangunan, Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 menerbitkan surat berharga jangka panjang berbasis syariah yang dikenal dengan *Project Based Sukuk (PBS)*. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menarik investor agar menanamkan dananya pada sejumlah proyek pemerintah sehingga mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah dalam penerbitan Sukuk PBS sebagai sebuah instrumen dalam membantu proses Pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode *Desk Research* kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai laporan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan Sukuk PBS bahwa ekonomi syariah mempunyai peran penting dalam membantu pemerintah khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dan diharapkan secara bertahap dapat mengurangi konsep riba yang telah berlangsung selama ini.

Kata Kunci: SBSN, Project Based Sukuk, Infrastruktur

A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan elemen krusial bagi kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan modal yang tersedia untuk membiayai proyek-proyek besar dan kompleks. Banyak proyek infrastruktur memerlukan investasi awal yang signifikan, dan sering kali dana yang tersedia melalui anggaran pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada pendanaan eksternal, baik dari lembaga internasional maupun sektor swasta, yang belum sepenuhnya optimal.¹

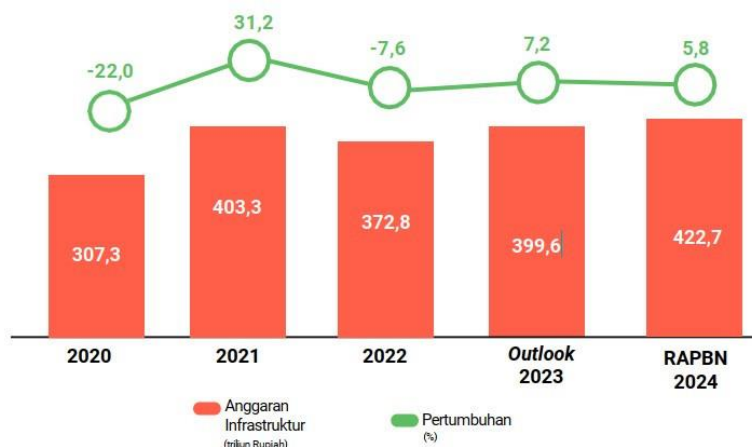
Teori ekonomi neoklasik menyatakan bahwa infrastruktur berperan sebagai faktor produksi yang penting, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Investasi infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi dapat

¹ World Bank. (2021). "*Financing Infrastructure: A Global Perspective*." www.worldbank.org diakses pada 27/09/2024

mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan akses ke pasar.² Menurut teori pertumbuhan endogen menggambarkan bahwa investasi dalam infrastruktur dapat mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas. Infrastruktur yang baik dapat memfasilitasi penyebaran teknologi dan pengetahuan, yang menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang.³

Masalah modal adalah aspek kritis dalam pembangunan infrastruktur, yang dapat mempengaruhi implementasi berbagai teori pembangunan. Memahami hubungan ini membantu pembuat kebijakan untuk merancang strategi pendanaan yang lebih efektif dan memastikan bahwa investasi infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ketidakcukupan dana tidak hanya terjadi karena keterbatasan anggaran, tetapi juga karena kurangnya skema pembiayaan yang inovatif. Banyak proyek infrastruktur di Indonesia masih mengandalkan model tradisional yang mungkin tidak menarik bagi investor swasta. Risiko tinggi yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur, seperti risiko politik, lingkungan, dan ekonomi, sering kali menjadi penghalang bagi investasi. Investor cenderung enggan untuk berpartisipasi tanpa jaminan atau insentif yang memadai.⁴

Grafik 1. Anggaran Infrastruktur Indonesia (Triliun Rupiah)



Sumber: Kemenkeu, 2023.

Dalam era pembangunan infrastruktur yang terus meningkat, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk berbagai proyek publik. Salah satu solusi yang semakin populer adalah

² John M Halstead dan Steven C Deller, "Public infrastructure in economic development and growth: Evidence from rural manufacturers", *Community Development*, Vol. 28 No. 2 (1997), h. 149–69,.

³ Charles I Jones, "Paul Romer: Ideas, nonrivalry, and endogenous growth", *The Scandinavian Journal of Economics*, Vol. 121 No. 3 (2019), h. 859–83,.

⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2022). "Tantangan Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia." www.pu.go.id diakses pada 27/09/2024

penggunaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berbasis proyek atau yang sering disebut sebagai sukuk. Instrumen ini tidak hanya menawarkan alternatif pembiayaan yang inovatif, tetapi juga mendukung prinsip syariah yang semakin diminati oleh para investor.⁵

SBSN berbasis proyek memungkinkan pemerintah untuk menggalang dana melalui penerbitan sukuk yang spesifik untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur tertentu, seperti jalan tol, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Dengan struktur yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan dan transparansi, instrumen ini menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.⁶ Keberhasilan penerbitan SBSN ini juga didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan peringkat kredit negara dan memperkuat basis investor.⁷ Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sukuk berbasis proyek menawarkan peluang untuk menginvestasikan dana dalam proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.⁸

Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai SBSN *project based sukuk*, manfaatnya sebagai instrumen investasi dalam upaya membangun negeri melalui pembangunan infrastruktur.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi *desk research* kualitatif. Penelitian ini meneliti berbagai referensi yang terkait dengan isi penelitian. Penelitian Kualitatif merupakan metode untuk menggali dan memahami makna yang diyakini berkaitan dengan masalah sosial dan kemanusiaan. Salah satu cirinya adalah Penelitian kualitatif berusaha menciptakan gambaran yang kompleks tentang masalah atau isu yang diteliti.⁹ Hal ini dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai perspektif, identifikasi faktor-faktor yang terkait dengan variabel utama yang menjadi obyek penelitian, dan kemudian

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). "*Penerbitan Sukuk: Peluang dan Tantangan*." www.ojk.go.id diakses pada 27/09/2024

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). "*Sukuk untuk Pembangunan Infrastruktur*." www.kemenkeu.go.id diakses pada 27/09/2024

⁷ Taufiq Kurniawan dan Asmak Ab Rahman, "Analisis Pelaksanaan Akad Ijârah dalam Sukuk Project Based Sukuk di Indonesia", in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 19, 2019, h. 37–54,.

⁸ World Bank. (2021). "*Financing Infrastructure in Indonesia: The Role of Sukuk*." www.worldbank.org diakses pada 27/09/2024

⁹ John W Creswell, "Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed", 2012.

mengungkapkan dalam bentuk gagasan-gagasan yang logis sehingga akan memunculkan gambaran besar, dan pada akhirnya dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Data yang digunakan terutama diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Keuangan dan Risiko Kementerian Keuangan, terutama yang terkait dengan jumlah penerbitan SBSN PBS dan proyek infrastruktur yang didanai dengan cara ini. Selain itu, Beberapa data pendukung juga diperoleh dari Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia yang dirilis oleh Bank Indonesia yang terkait dengan perkembangan pasar keuangan Islam, khususnya pasar Sukuk.

C. PEMBAHASAN

1. Strategi Pembiayaan Proyek Infrastruktur di Indonesia

Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah dengan melalui pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.¹⁰ Terciptanya hubungan antar wilayah akan memacu mobilitas tenaga kerja antarwilayah sekaligus mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan mendorong terbentuknya investasi baru, dan lapangan kerja baru, yang berarti terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat.

Demikian pula, tersedianya infrastruktur energi dan transportasi dapat mendorong terjadinya transfer sumber daya alam dari daerah surplus ke daerah yang kekurangan.¹¹ Dengan demikian, pemerataan pembangunan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan pendapatan apabila terjadi peningkatan produktivitas dan pengembangan dana investasi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.¹²

Dengan alokasi anggaran yang rinci dan komprehensif, diharapkan output dari proyek-proyek ini akan secara efektif mendukung transformasi ekonomi, menciptakan pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia. Sebagaimana proyek pemerintah lainnya, proyek infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pendanaan. Karena

¹⁰ Fiona Lamari et al., "An Exploratory Study of Sukuk Utilisation for Transportation Infrastructure Development in Indonesia", *Makara Journal of Technology*, Vol. 22 No. 1 (2018), hal.53.

¹¹ Waluyo Zulfikar, "Dampak Sosial, Ekonomi Dan Politis Dalam Pembangunan Bandara Udara Kertajati Di Kabupaten Majalengka", *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol. 1 No. 01 (2017), hal.59.

¹² Erika Sefila Putri dan Wisudanto Wisudanto, "Struktur pembiayaan pembangunan infrastruktur di indonesia penunjang pertumbuhan ekonomi", *IPTEK Journal of Proceedings Series*, Vol. 3 No. 5 (2017), hal.68.

dana memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah harus memiliki strategi yang tepat untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut.¹³ Tanpa dukungan konsep pembiayaan yang baik, pembangunan infrastruktur akan mengakibatkan jebakan utang bagi negara. Artinya, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan struktur pembiayaan dan konsep investasi yang matang sehingga dapat menghasilkan multiplier effect yang positif bagi negara.¹⁴

Multiplier effect terhadap perekonomian nasional tidak akan terlalu besar apabila dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin pemerintah. Oleh karena itu, selain untuk menutupi defisit APBN, orientasi penerbitan Sukuk Negara juga harus diarahkan sebagai sumber investasi bagi pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, telekomunikasi, energi, dan lain sebagainya. Penerbitan Sukuk Negara misalnya, ditujukan untuk mempercepat pembangunan pelabuhan di Indonesia Timur dan kawasan strategis lainnya yang akan berdampak signifikan terhadap perkembangan industri dalam negeri.

Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur bandara, jalan tol antar daerah, terutama di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, serta proyek-proyek lainnya, akan mendorong peningkatan arus lalu lintas perdagangan, baik impor maupun ekspor. Dengan demikian, multiplier effect yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur akan sangat besar dan berdampak positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁵

2. Project Based Sukuk (PBS)

Project Based Sukuk (PBS) merupakan salah satu dari sekian produk sukuk yang ada di zaman modern ini, di mana produk ini menggunakan beberapa akad atau kontrak yang telah dibincangkan dalam karya klasik para *fuqahâ*'. Akad utamanya adalah akad al-ijârah, dengan struktur *ijârah asset to be leased* (*Ijârah al-Maujûdât al-Mau'ûd Bisti'jarihâ* (IMMB)). DSN-MUI memberikan hasil ijthâdnya berupa fatwa yang menyatakan bahwa IMMB merupakan akad yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Adapun

¹³ Ferdy Posumah, "Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15 No. 3 (2015), hal.1-2.

¹⁴ Erika Sefila Putri dan Wisudanto Wisudanto, *Op.Cit.* hal.222.

¹⁵ Eri Hariyanto, "Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN", *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1 (2017), hal.79-98, <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.15>.

definisi IMMB sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No: 76/DSN-MUI/ VI/2010¹⁶ adalah akad *ijârah* yang objek *ijârah*nya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian objek *ijârah* sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan objek *ijârah* dilakukan pada masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan.

Di samping akad atau kontrak yang utama tadi, terdapat juga kontrak-kontrak pendukung lainnya dalam membentuk *Project Based Sukuk* (PBS). Akad yang mendasari *Project Based Sukuk* (PBS) hanya akad *ijârah* (sewa). Namun, untuk dapat melaksanakan *Project Based Sukuk* (PBS), harus melalui beberapa proses akad yang banyak dan memerlukan peran beberapa pihak yang menjalankan kontrak-kontrak tersebut. Antara kontrak yang harus dilakukan adalah akad *al-bai'* (jual beli), *wakâlah* (per-wakilan), *ijârah* (sewa) dan janji untuk men-jual dan membeli kembali (*al-wa'd bi al-bai' wa al-syirâ*).¹⁷

Sukuk PBS merupakan salah satu jenis Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2012. Sukuk terbagi menjadi dua versi, yaitu Sukuk dengan mekanisme *underlying project* dan Sukuk dengan mekanisme *project financing*. Sukuk yang diterbitkan dengan mekanisme *underlying project* digunakan untuk membiayai APBN secara umum. Sementara itu, Sukuk yang diterbitkan dengan mekanisme *project financing* (PBS) digunakan secara khusus untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang direncanakan dalam APBN. Kedua jenis Sukuk ini relevan dengan perkembangan saat ini karena pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun berbagai infrastruktur di Indonesia.

Perbedaan Sukuk PBS dengan Sukuk Non-PBS terletak pada pemanfaatan dana yang bersumber dari penerbitan Sukuk Negara. Sukuk Negara Non-PBS digunakan untuk membiayai APBN secara umum, khususnya untuk menutup defisit anggaran; sedangkan penerbitan Sukuk PBS digunakan untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga. Dengan kata lain, Sukuk Non-PBS ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga bersifat umum; sedangkan Sukuk PBS hanya ditujukan untuk membiayai proyek-proyek tertentu (bersifat khusus). Dana yang diperoleh dari

¹⁶ Dewan Syariah Nasional, "Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional", Jakarta: Tim Penulis, 2000, hal 31,39.

¹⁷ Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI), *Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, ed. Dahlan Siamat (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI, 2014), hal.132-133.

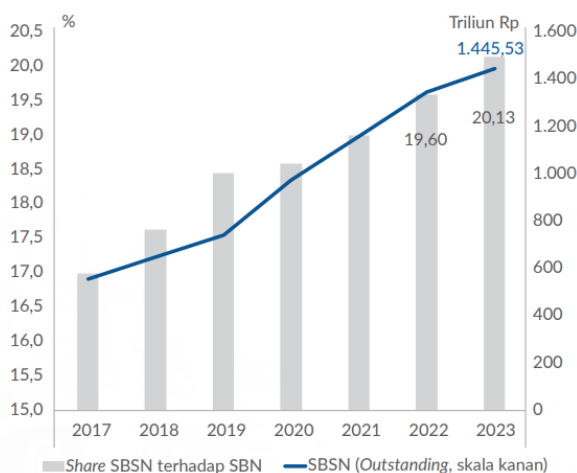
penerbitan Sukuk tersebut secara langsung ditujukan atau diperuntukkan untuk membiayai proyek-proyek yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.¹⁸

3. Peran *Project Based Sukuk* (PBS) Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa masalah ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi investor untuk berbisnis di Indonesia. Oleh karena itu, sejak tahun 2015, Pemerintah Indonesia berupaya keras mengatasi masalah minimnya infrastruktur dengan meningkatkan anggaran belanja negara.¹⁹ Pemerintah Indonesia terus meningkatkan belanja produktif, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah, sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi, air bersih, dan kebutuhan mendesak lainnya.²⁰

Pada Desember 2023, nilai *outstanding* SBSN mencapai Rp1.445.53 triliun, meningkat 7,53% dari tahun 2022 (Grafik 2). Hal tersebut mencerminkan inovasi alternatif pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang turut berkontribusi dalam pembangunan proyek pemerintah.

Grafik 2. Perkembangan Penerbitan SBSN



¹⁸ Wurjanto Nopijantoro, "Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur", *Substansi*, Vol. 1 No. 2 (2017), hal.396.

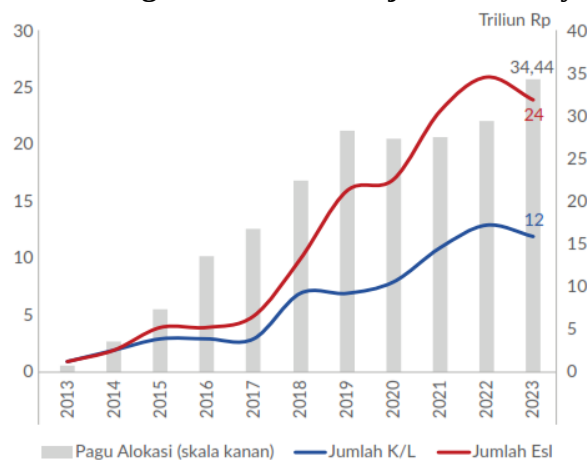
¹⁹ Irfan Syauqi Beik, "Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2 (2019).

²⁰ Reifa Qisthi Mitsaliyandito dan Tika Arundina, "Dynamic relationship between sovereign bond and sukuk market developments in Indonesia", *Pertanika: Social Sciences and Humanities*, Vol. 26 No. 5 (2018), hal.34-35.

Sumber: Bappenas, 2023.

Penerbitan ini juga sejalan dengan pangsa SBSN terhadap SBN yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Daftar Prioritas Proyek (DPP) Surat Berharga Syariah tahun 2023 yang diajukan Bappenas kepada Kementerian Keuangan, pagu alokasi pembiayaan proyek pemerintah oleh SBSN adalah sebesar Rp34,4 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp29,5 triliun (Grafik 3). Pembiayaan pada tahun 2023 dialokasikan untuk 12 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing K/L. Hal ini terlihat dari anggaran pembiayaan infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan pada gambar berikut.²¹

Grafik 3. Perkembangan Alokasi Belanja SBSN Proyek Bappenas



Sumber: Bappenas, 2023.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang nomor 19 tahun 2018 tentang Surat Berharga Syariah Negara, tujuan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah untuk pembiayaan defisit APBN dan pembiayaan proyek infrastruktur milik pemerintah. Peran Sukuk negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara berbasis pembiayaan proyek atau Sukuk Negara dengan seri PBS (*Project Based Sukuk*) pada tahun 2012.

Gambar 1. Rincian Daftar Proyek Prioritas (DPP) SBSN 2013-2023

²¹ Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi & Keuangan Syariah Indonesia 2023*. (2023)

KEMENPUPR  Jalan dan Jembatan 495 Proyek  Sumber Daya Air 596 Proyek	KEMENHUB  Terminal 57 Proyek  Sarana Kereta Api 88 Proyek  Bandar Udara 55 Proyek  Pelabuhan 48 Proyek	KEMHAN & POLRI  Rumah Dinas 163 Proyek	KEMENTAN  Peternakan 6 Proyek  Gedung 3 Proyek
KEMENDIKBUDRISTEK  Universitas 53 Proyek  Pendidikan Vokasi 37 Proyek	KEMENAG  KUA 1219 Proyek  Madrasah dan UIN 564 Madrasah 151 UIN  Haji & Umroh 175 Proyek  Produk Halal 1 Proyek	Laboratorium (BRIN, BMKG)  31 Proyek	KEMENPERIN  4 Proyek

Sumber: Bank Indonesia, 2023.

Sebagian besar dana SBSN melalui penerbitan *Project Based Sukuk* (PBS) digunakan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur yang berkontribusi penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selama 2013-2023, pengajuan pembangunan proyek Pemerintah oleh Bappenas yang menggunakan SBSN didominasi untuk pembiayaan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan, sumber daya air, sarana transportasi dan bangunan sekolah. Adapun sebaran realisasi pembiayaan SBSN berdasarkan wilayah regional selama 2013-2023, masih didominasi Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Dalam jangka pendek, Pembangunan infrastruktur menjadi motor penggerak ekonomi dari sisi permintaan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Dalam jangka panjang, Pembangunan infrastruktur berkontribusi di sisi penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa sehingga tercipta efisiensi ekonomi. infrastruktur berkontribusi di sisi penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa sehingga tercipta efisiensi ekonomi.²²

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penerbitan *Project Based Sukuk* (PBS) secara tidak langsung telah membantu pembangunan ekonomi Indonesia, dengan pengadaan proyek tersebut akan mempengaruhi 17 sektor yang menjadi *input-output* Indonesia yang mana akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada publikasi *World Development Report* oleh World Bank pada tahun 1994, bahwa infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Studi dari *World Bank* juga melaporkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan

²² Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi & Keuangan Syariah Indonesia 2023*. (2023), p.35

pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan.²³

Dalam pelaksanaan proyek tersebut akan banyak pihak yang terlibat dan juga menerima manfaatnya, dimulai dengan fase awal yang mana proses penerbitan *Project Based Sukuk* (PBS) akan menjadi instrumen investasi bagi masyarakat dimana masyarakat akan menerima imbalan dari investasinya yang akan menambah pendapatannya, kemudian pada proses pembangunannya akan banyak membutuhkan banyak tenaga kerja yang mana akan membuka lapangan pekerja bagi masyarakat yang akan menaikkan pendapatannya, setelahnya dengan pengadaan proyek tersebut tentunya akan ada tujuan dari pembangunannya sendiri seperti pembangunan jalan dan jembatan yang akan memperlancar akses perekonomian masyarakat, pengadaan sumber daya air yang akan meningkatkan produksi pada sektor pertanian dan perikanan, pembangunan sarana transportasi yang akan memudahkan serta meningkatkan mobilitas masyarakat, serta pembangunan pada sektor pendidikan yang mana akan menambah kualitas serta kuantitas dari pendidikan di Indonesia.

SBSN *Project Based Sukuk* (PBS) tidak hanya digunakan sebagai sarana pembiayaan proyek, tetapi juga sebagai sarana investasi bagi investor dan masyarakat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperkenalkan SBSN *Project Based Sukuk* (PBS) sebagai wahana investasi masyarakat. Selama ini SBSN *Project Based Sukuk* (PBS) dipandang hanya sebagai sumber pembiayaan utang, namun pemerintah perlu mengubah persepsi tersebut dari sudut pandang investor dan masyarakat, yaitu sebagai sarana investasi. Sebab, pembeli sukuk selain dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, juga dapat memperoleh imbal hasil dan keuntungan. ditambah dengan membeli Sukuk berarti masyarakat berperan aktif dan sungguh-sungguh dalam pembangunan nasional.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Project Based Sukuk* (PBS) merupakan instrumen investasi syariah yang diperuntukkan dalam Pembangunan infrastruktur, Dimana selain membantu pemerintah dalam melaksanakan pembiayaan APBN, *Project Based Sukuk* (PBS) juga memberikan multieffek baik kepada pemerintah, investor dan juga kepada Masyarakat luas. Selain itu, *Project Based Sukuk* (PBS) juga membantu memberikan opsi investasi yang halal dan terhindar dari riba.

Saran yang dapat diberikan penulis kepada pemerintah selaku penerbit *Project Based Sukuk* (PBS) ialah perlu mendorong dan meningkatkan pangsa pasar dengan

²³ Taufiq Kurniawan dan Asmak Ab Rahman, "Project Based Sukuk (PBS) and Its Implementation in Economic Development in Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. 16 No. 1 (2019), h. 41–66.

melakukan promosi serta edukasi mengenai instrumen investasi ini, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban hutang luar negeri dan mengoptimalkan pembiayaan melalui instrument investasi syariah salah satunya melalui *Project Based Sukuk* (PBS).

DAFTAR PUSTAKA

- Beik, Irfan Syauqi. “Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2 No. 2 (2019).
- Creswell, John W. “Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed”. 2012.
- Halstead, John M, dan Steven C Deller. “Public infrastructure in economic development and growth: Evidence from rural manufacturers”. *Community Development*. Vol. 28 No. 2 (1997), h. 149–69.
- Hariyanto, Eri. “Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN”. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. Vol. 2 No. 1 (2017), h. 79–98. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.15>.
- Jones, Charles I. “Paul Romer: Ideas, nonrivalry, and endogenous growth”. *The Scandinavian Journal of Economics*. Vol. 121 No. 3 (2019), h. 859–83.
- Kurniawan, Taufiq, dan Asmak Ab Rahman. “Analisis Pelaksanaan Akad Ijârah dalam Sukuk Project Based Sukuk di Indonesia”. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*., 19:37–54 2019.
- , “Project Based Sukuk (PBS) and Its Implementation in Economic Development in Indonesia”. *Al-’Adalah*. Vol. 16 No. 1 (2019), h. 41–66.
- Lamari, Fiona et al. “An Exploratory Study of Sukuk Utilisation for Transportation Infrastructure Development in Indonesia”. *Makara Journal of Technology*. Vol. 22 No. 1 (2018), h. 8.
- Mitsaliyandito, Reifa Qisthi, dan Tika Arundina. “Dynamic relationship between sovereign bond and sukuk market developments in Indonesia”. *Pertanika: Social Sciences and Humanities*. Vol. 26 No. 5 (2018), h. 27–38.
- Nasional, Dewan Syariah. “Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional”. *Jakarta: Tim Penulis*. 2000.
- Nopijantoro, Wurjanto. “Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan

Infrastruktur”. *Substansi*. Vol. 1 No. 2 (2017), h. 1–17.

Posumah, Ferdy. “Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15 No. 3 (2015).

Putri, Erika Sefila, dan Wisudanto Wisudanto. “Struktur pembiayaan pembangunan infrastruktur di indonesia penunjang pertumbuhan ekonomi”. *IPTEK Journal of Proceedings Series*. Vol. 3 No. 5 (2017).

Zulfikar, Waluyo. “Dampak Sosial, Ekonomi Dan Politis Dalam Pembangunan Bandara Udara Kertajati Di Kabupaten Majalengka”. *Jurnal Caraka Prabhu*. Vol. 1 No. 01 (2017), h. 58–77.

www.bi.go.id

www.djppr.kemenkeu.go.id

www.kemenkeu.go.id

www.bappenas.go.id